

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

Program Wajib Belajar 12 tahun adalah wajib belajar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendidikan merupakan hal paling penting dalam suatu Negara. Pendidikan merupakan upaya dasar dan terencana dalam menyiapkan pembangunan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk lebih baik. Berdasarkan pengertian belajar diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku tertentu baik dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari badan yang telah dipelajari.

2.1.1. Pembangunan Masyarakat Bidang Pendidikan

Pendidikan berasal dari bahasa latin 'Educare' yang berarti keluar, pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju kecerahan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam arti luas pendidikan baik formal atau informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang diri mereka. Dalam kehidupan manusia sangat diperlukan apa yang namanya pendidikan, oleh karena itu biasanya pendidikan itu dilakukan dalam bentuk pembelajaran dalam sebuah

sekolah formal maupun informal, seperti SD, SLTP, SLTA bahkan sampai perguruan tinggi.

Jadi apabila dalam kehidupan manusia tidak dibarengi dengan pendidikan otomatis kehidupan manusia itu tidak akan terarah dengan baik, tetapi sebaliknya apabila kehidupan manusia dibarengi dengan pendidikan maka kehidupannya pun akan terarah menjadi lebih baik. Pembangunan merupakan perbaikan untuk menuju ke arah yang lebih maju, perbaikan dari yang belum ada menjadi ada, perbaikan dari yang jelek menjadi lebih baik. Dalam rencana pembangunan lima tahunan juga ditegaskan bahwa pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah serta diusahakan agar dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sector pembangunan. Persepsi yang keliru tentang arti pembangunan, yang menganggap bahwa pembangunan itu hanya semata-mata pembangunan material dapat berdampak menghambat pembangunan system pendidikan, karena semestinya pembangunan itu bersifat komprehensif yaitu mencakup pembangunan manusia dan lingkungannya.

Jika pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia maka dalam ruang gerak pembangunan, manusia dapat diapandang sebagai 'objek' dan sekaligus juga sebagai 'subjek' pembangunan. Sebagai objek pembangunan manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini pembangunan meliputi ikhtisar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan

pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif serta keterampilan kerja. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau spiritual. Jadi pendidikan mengarah ke dalam diri manusia sedangkan pembangunan mengarah keluar yaitu lingkungan sekitar manusia.

Manusia sebagai sasaran pembangunan wujudnya diarahkan dari keadaan yang masih bersifat 'potensial' ke keadaan 'aktual'. Fuad Hasan menyatakan :

“Manusia adalah makhluk yang terentang antara ‘potensi’ dengan ‘aktualisasi’ (manusia dan citranya, juni 1985). Di antara dua kutub itu terentang upaya pendidikan. Dalam hubungan itu perlu dicatat bahwa pendidikan berperan mengembangkan yaitu menghidupkan potensi-potensi ‘kebaikan’ dan sebaliknya mengerdilkan potensi kejahatan. Potensi-potensi kebaikan yang perlu dikembangkan aktualisasinya seperti kemampuan berusaha, berkreasi, kesiapan menerima kenyataan, berpendirian, rasa bebas yang bertanggung jawab, kejujuran, toleransi, rendah hati, tenggang rasa, kemampuan bekerjasama, menerima, melaksanakan kewajiban sebagai keniscayaan, menghormati hal orang lain dan seterusnya”.

Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik awal,

karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi hajat masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai mahluk. Bahwa hasil pendidikan itu menunjang pembangunan, juga dapat dilihat korelasinya dengan peningkatan kondisi social ekonomi peserta didik yang mengalami pendidikan.

Uraian di atas menunjukkan 'status' pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan antar keduanya.

1. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia sedangkan pembangunan merupakan usaha ke luar dari diri manusia.
2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan (pembinaan, penyedia sarana, dan seterusnya).

Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak yang cukup panjang antara dimulainya proses usahanya dengan tercapai hasil. Jika pembangunan dipandang sebagai system makro maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Segi sasaran pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia

pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Slamet Iman Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik di mana pun ia berada akan memperbaiki lingkungan.

a. Segi lingkungan pendidikan

Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau system. Lingkungan keluarga (pendidikan informal), lingkungan sekolah (pendidikan formal), lingkungan masyarakat (pendidikan non formal), ataupun dalam system pendidikan pra-jabatan dan dalam jabatan.

1. Lingkungan keluarga (pendidikan informal)

Di dalam lingkungan keluarga anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, morel yang ditanamkan keyakinan-keyakinan penting yang mendarah daging merupakan landasan yang sangat diperlukan untuk pembangunan.

2. Lingkungan sekolah (pendidikan formal)

Di lingkungan sekolah, peserta didik bimbing, untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan

sikap. Bekal yang baik yaitu berupa bekal bekal dasar, lanjutan (dari SD dan sekolah lanjutan) ataupun bekal kerja yang langsung dapat digunakan secara aplikatif (sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi). Kedua macam bekal tersebut dipersiapkan secara formal dan berguna sebagai sarana penunjang pembangunan di berbagai bidang.

3. Lingkungan masyarakat (pendidikan nonformal)

Di lingkungan masyarakat, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. Pada masyarakat kita sistem pendidikan non formal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini bertalian erat dengan semakin berkembangnya sector swasta yang menunjang pembangunan. Di segi lain, hal tersebut dapat diartikan bernilai positif karena dapat mengkompensasikan keterbatasan lapangan kerja formal di lembaga-lembaga pemerintah. Disamping itu juga dapat memperbesar jumlah angkatan kerja tingkat rendah dan menengah yang sangat diperlukan untuk memelihara proporsi yang selaras antara pekerja rendah, menengah, dan tinggi. Hal demikian dapat

dipandang sebagai upaya untuk menciptakan kestabilan Nasional.

4. Segi jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah (SM), dan pendidikan tinggi (PT), memberikan bekal kepada peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya pendidikan tinggi berkualitas, jika pendidikan menengahnya berkualitas dan pendidikan dasarnya berkualitas. Dengan basic education pada pendidikan dasar juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri dalam gerak pembangunan.

5. Segi pembedaan kerja atau sektor kehidupan.

Pembedaan kerja menurut sector kehidupan meliputi antara lain:

Bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan dan lain-lain. Pembangunan sector kehidupan tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas, pembinaan, pengembangan, dan pengisian

bidang-bidang kerja tersebut agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa sehingga tetap jaya dalam kancah kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu.

Uraian tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan seperti dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan
- b. Manusia yang menjadi kunci pembangunan
- c. Pendidikan memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia pencipta pembangunan.

Tanpa pendidikan, seorang tidak akan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan kesulitan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Oleh sebab itu, urgensi pendidikan menjadi hal yang tidak terelakan lagi. Salah satu indikatornya tampak dari berbagai macam tujuan pendidikan yang bervariasi dan mengandung aspek-aspek primer bagi kehidupan. Seperti dimuat oleh pasal 3 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan, jika pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri disamping pula menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Langeveld melalui bukunya yang berjudul 'Boknopte theoretische paedagogiek' (dalam Munib, 2009:49-50) juga menyampaikan beberapa tujuan pendidikan. Bahkan dengan penjabaran yang lebih ekstensif. Adapun tujuan-tujuan pendidikan tersebut terdiri dari tujuan umum, tujuan tidak sempurna, tujuan sementara, tujuan perantara, tujuan incidental, serta tujuan khusus, penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan umum, tujuan dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan ini berakar dari tujuan hidup dan berhubungan dengan pandangan tentang hakikat manusia, tentang apa tugas dan arah hidup manusia.
- b. Tujuan tidak sempurna, tujuan yang menyangkut segi-segi tertentu, seperti kesusilaan, keagamaan, kemasyarakatan, keindahan, seksual dan sebagainya, semua itu tidak terlepas dari tujuan umum.
- c. Tujuan sementara, tempat pemberhentian sementara belajar bicara, membaca, menulis, dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu berkomunikasi dalam kehidupannya.
- d. Tujuan perantara, tujuan ini dinamakan juga tujuan intermedial. Tujuan perantara ditentukan dalam rangka mencapai tujuan sementara.
- e. Tujuan incidental, tujuan ini hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terlepas saat demi saat dalam proses menuju pada tujuan umum.

- f. Tujuan khusus, tujuan ini adalah pengkhususan dari tujuan umum, misalnya sehubungan dengan gender maka diselenggarakan SMKK (khusus putri) dan STM (khusus putra).

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Pendidikan Nasional meliputi:

- 1) standar isi, 2) standar kompetensi lulusan, 3) standar proses, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan.

Sekolah harus menyusun dan melaksanakan program pemenuhan SPN (standar Pendidikan Nasional) yang realitas dan sesuai kondisi nyata (berdasarkan hasil analisis konteks) dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah, melalui berbagai strategi antara lain:

1. Standar isi

Pemenuhan standar isi dapat dilaksanakan melalui pengembangan dan pemberlakuan KTSP sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku; mensosialisasikan KTSP baik internal maupun eksternal; mengevaluasi dan memvalidasi dokumen KTSP secara periodik.

2. Pemenuhan standar kompetensi Lulusan

Dapat dilaksanakan melalui pemetaan SKL satuan pendidikan, SKL kelompok mapel dan SKL mata pelajaran (keterkaitannya dengan SK dan KD dalam S1); memanfaatkan hasil UN dan US dalam penyusunan program perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu lulusan.

3. Pemenuhan standar proses

dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat pembelajaran; optimalisasi sarana prasarana dan lingkungan yang tersedia baik dalam maupun luar sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran; optimalisasi pengawasan proses pembelajaran; dan tidak lanjut perbaikan pelaksanaan pembelajaran secara periodik

4. Pemenuhan standar penilaian

Melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat penilaian; melaksanakan dan mengelola hasil penilaian peserta didik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku; penyampaian hasil penilaian peserta didik kepada orang tua dan pihak lain yang berkepentingan.

5. Pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan

Dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di luar sekolah, serta pengusulan mutasi antar sekolah dan atau pengangkatan guru yang dibutuhkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

6. Pemenuhan standar sarana dan prasarana

Dapat dilaksanakan melalui optimalisasi penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana yang ada, penghapusan atau hibah ke sekolah lain yang memerlukan dan penambahan sarana dan prasarana baru.

7. Pemenuhan standar pengelolaan

Dapat dilaksanakan melalui optimalisasi seluruh sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai kewenangan sekolah; menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah dalam keseluruhan proses pengelolaan sekolah; penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja; melaksanakan validasi/perbaikan program kerja secara periodik; meningkatkan peran serta para pembina mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

2.1.2 Wajib Belajar 12 Tahun

Wajib belajar merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atau tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional). Sedangkan

menurut (Soedijarto,2008) pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari ‘compulsary education’ merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan.

Program wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah tamat SMP atau sederajat dengan batas usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau sederajat sampai tamat (Aulia,2012). Adapun tujuan wajib belajar adalah untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara indonesia untuk dapat mengembangkan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sedangkan wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemeratan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara indonesia. (PP No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar).

Penyelenggaraan wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar yaitu SD, MI, SMP, MTS, dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pada pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, B, C dan bentuk lain yang sederajat. Untuk pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga atau pendidikan lingkungan (PP No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar).

Penyelenggaraan wajib belajar pada satuan pendidikan yang wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya sesuai dengan daya tampung dan melaksanakan wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standar nasional

pendidikan. Sedangkan pengelolaan wajib belajar menurut PP No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar yaitu wajib belajar secara nasional menjadi tanggung jawab menteri, tanggung jawab kepala daerah baik pada tingkat provinsi kabupaten/kota dan pada tingkat satuan pendidikan dasar vmenjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pada pendidikan menengah dan pemerintah daerah berhak mengatur sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah serta mencantumkan kebijakan dibidang pendidikan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah dan peraturan perundang-undangan daerah bidang pendidikan.

Penjamin Wajib Belajar, pemerintah dan pemerintahan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tznpa memungut biaya dan memberikan biaya pendidikan kepada warga negara yang orang tuanya kurang mampu. Pemerintah provinsi/kota daerah juga menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal dan ketersediaan sumber daya di bidang pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat lintas kabupaten/kota di wilayah untuk pelaksanaan wajib belajar. Setiap warga negara indonesia usai sekolah wajib mengikuti program belajar.

Pengawasan wajib belajar, pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional sedangkan pemerintah daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada

satuan pendidikan di daerah masing-masing. Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kebijakan wajib belajar 12 tahun di kabupaten melawi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah kabupaten melawi Nomor 3 tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat. Wajib belajar 12 tahun di kabupaten Melawi dilaksanakan mulai pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah yang meliputi SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA , SMK dan bentuk lain yang sederajat dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 tahun di desa Nanga Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi.

2.2 Teori

2.2.1. Administrasi Pembangunan

Adminitrasi pembangunan merupakan proses pngendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk melaksanakan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Banyak pengertian administrasi pembangunan yang diberikan oleh ahli Administrasi Negara (Pembangunan).

Siagian (2009:5) administrasi pembangunan adalah suluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah

secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Afifudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Freed W. Riggs (1994) pengertian administrasi saat dirumuskan melalui 2 kesimpulan umum. Pertama, administrasi pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan, dengan metode-metode yang digunakan oleh organisasi besar terutama oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan mereka. Kedua, arti dari istilah Administrasi pembangunan dikaitkan dengan implikasinya, tidak dengan pengertiannya secara langsung.

Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kemampuan administratif. Jelaskan apabila suatu program pembangunan berhasil dilaksanakan dengan sendirinya akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan dilingkungan masyarakat politik, termasuk perubahan kemampuan masyarakat dalam bidang administratif.

1. Ginandjar Kartasasmita (1997) Administrasi Pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari system administrasi negara yang sedang membangun serta upaya meningkatkan kemampuannya. Hal ini berarti bahwa dalam studi dan praktik administrasi pembangunan diperlukan

adanya perhatian dan komitmen terhadap nilai-nilai yang mendasari dan perlu diwujudkan menjadi dasar etikabirokrasi. Dengan demikian dari dua sisi dalam batasan pengertian administrasi pembangunan tersebut. Pada sisi pertama tercakup upaya untuk mengenali peranan administrasi. Negara dalam pembangunan, atau dengan kata lain administrasi dari proses pembangunan, yang membedakan administrasi negara dalam pengertian umum. Pada sisi kedua tercakup kehendak untuk mempelajari dengan cara bagaimana membangun administrasi negara dengan tugas pembangunan. Namun tidak kalah pentingnya perhatian dan komitmen terhadap kepentingan baik yang menjadi ukuran bagi kredibilitas dan akuntabilitas

2. Todaro (2002:21) menegaskan pembangunan secara luas strategis suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu system social secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Oleh karena itu, Goulet dkk dan Todaro (dalam Todaro (2002:21) menegaskan ada 3 (tiga) komponen dasar atau nilai inti untuk memahami hakikat pembangunan yaitu (1) kecukupan (sustenance) untuk memenuhi kebutuhan dasar, (2) Jati diri (selfesteem) menjadi manusia seutuhnya dan (3) Kebebasan (freedom) dari sikap menghambat kemampuan untuk memilih. Ketiga hal ini adalah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiga nilai pembangunan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Todaro yang secara garis besar dapat dijelaskan seperti uraian berikut. Kecukupan yang mengarah untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hal

ini bukan hanya mencakup kebutuhan pangan, melainkan juga mencakup kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi akan melahirkan kemiskinan absolut. Kebutuhan dasar yang umum terdiri dari:

- a) Kesehatan
- b) Air
- c) Pakaian
- d) Tempat Tinggal
- e) Keamanan
- f) Kesehatan
- g) Pendidikan

Perlu ditegaskan pula bahwa pembangunan yang berhasil tidak semata-mata diukur dari kemajuan ekonomi. Untuk itu, muncul model pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan ini merupakan konsep yang mengintegrasikan ekologi, ekonomi, dan social yang disebut pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yang telah disepakati secara global sejak diselenggarakannya United Conference On The Human Environment (UNCHE) di Stockholm pada tahun 1972. Model ini muncul sebagai upaya mengatasi kelemahan model-model pembangunan sebelumnya. Kelemahan model-model pembangunan antara lain:

- a. Munculnya kerakusan manusia untuk mengejar materi
- b. Munculnya berbagai perilaku yang tidak manusia seperti diinjak injaknya nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dihargainya harkat dan martabat manusia.
- c. Terjadinya kesenjangan yang makin lebar antara si kaya dan si miskin
- d. Terjadinya kesenjangan yang makin lebar antara Negara kaya dengan Negara sedang berkembang.
- e. Pengangguran tinggi
- f. Munculnya kerusakan sumber daya alam yang massif dan mengalami kerusakan yang bersifat ekologis
- g. Penyusutan sumber daya alam yang luas biasa
- h. Timbulnya ketergantungan yang makin menjadi-jadi dari masyarakat Negara sedang berkembang ke masyarakatan Negara maju.
- i. Hilangnya beberapa nilai budaya yang adi luhung dan kearifan local sebagai akibat dari globalisasi.
- j. Makin lebar atau senjang antara kemajuan fisik dengan nonfisik (mental). Kemajuan fisik maju pesat, sedangkan kemajuan nonfisik tidak Nampak dan malah bertambah memprihatinkan serta masalah lainnya.

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat dan Mendukung Keberhasilan Pembangunan Masyarakat Bidang Pendidikan.

Redja Mudyahardjo (2016, 497-450), mengatakan factor-faktor penghambat dan pendukung pendidikan yaitu:

1. Faktor Penghambat

- a. Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga, rendahnya kondisi sosial ekonomi dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan kognitif, intelektual dan mental anak-anak. Kondisi sosial ekonomi yang rendah membuat anak mereka sulit sekali memperoleh hal-hal yang dapat mengembangkan kemampuan dan kualitas mereka, ini berlainan sekali dengan keluarga yang kondisi social ekonominya tinggi dan terdidik, mereka mempunyai kesempatan lebih luas untuk memperoleh fasilitas dan sarana guna mengembangkan kemampuan anak-anaknya, kondisi ini sangat mempengaruhi hasil atau prestasi pendidikannya sehingga banyak yang tidak mampu menyelesaikan sekolah.
- b. Kondisi Tempat Pendidikan Yang Tersedia, saat tidak memiliki tempat pendidikan yang memadai, maka peserta didik tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- c. Tingkat Aspirasi Masyarakat Tentang Peranan dan Pentingnya Pendidikan Bagi Hidup, aspirasi merupakan suatu topic bahasan penting, karena aspirasi berkaitan dengan cita-cita, tujuan, rencana, serta dorongan untuk bertindak dan berkarya. Aspirasi tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sebab aspirasi berkaitan dengan apa yang melatarbelakangi seseorang untuk mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Dalam hal ini bahwa aspirasi dapat pula kita maknai sebagai suatu ukuran bagi individu dalam melakukan apa yang ingin dilakukan atau tidak ingin dilakukan dalam kehidupannya. Pendidikan sebagai suatu proses yang

menghantarkan manusia kedalam kesempurnaan hidup dan menjadikan manusia mampu mengembangkan kehidupannya, menjadi salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat, tentunya harus mendapat dukungan aspirasi yang tinggi oleh masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan Pendidikan

a. Pembawaan

Pembawaan atau hereditas adalah sifat-sifat kecenderungan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak masih dalam kandungan sampai lahir. Pembawaan ini hanya merupakan potensi-potensi. Berkembang atau tidaknya suatu potensi yang ada pada seorang anak sangat tergantung kepada faktor-faktor lain.

b. Kepribadian

Perkembangan akhlak pada seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan yang pertama. Kemampuan seseorang dalam memahami masalah-masalah agama atau ajaran-ajaran agama, hal ini sangat dipengaruhi oleh intelegensi pada orang itu sendiri dalam memahami ajaran-ajaran agamanya.

c. Keluarga

Keadaan keluarga atau rumah tangga ialah keadaan atau aktivitas sehari-hari di dalam keluarga, seperti sikap orang tua kepada anak-anaknya, sikap ayah kepada ibu, sikap ibu kepada ayah serta sikap orang tua kepada tetangga. Sikap orang tua sangat mempengaruhi tingkat laku

anak, karena perkembangan sikap social anak dimulai dalam keluarga. Orang tua yang penyayang, lembut, adil dan bijaksana, akan menumbuhkan sikap social yang menyenangkan terhadap anak. Karena anak merasa diterima dan disayangi oleh orang tuanya, maka akan tumbuh rasa percaya diri pada anak sehingga terbentuk pribadi yang menyenangkan dan suka bergaul.

d. Guru atau tenaga pendidik

Pendidik adalah salah satu factor pendidikan yang sangat penting, karena pendidik merupakan orang yang akan bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Guru harus mampu menunjukkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, karena peran dan pengaruh seorang pendidik terhadap peserta didik sangat kuat.

e. Lingkungan

Salah satu faktor yang turut memberikan pengaruh dalam terbentuknya sikap seseorang adalah lingkungan dimana seorang tersebut berada. Lingkungan ialah suatu yang melingkup tubuh yang hidup, seperti tanah dan udara, sedangkan lingkungan manusia adalah apa yang mengelilinginya, seperti negeri, lautan, udara dan masyarakat. Lingkungan ada dua jenis yaitu lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan adalah factor yang sangat penting dalam pendidikan akhlak. Sebaik apapun pembawaan, kepribadian, keluarga,

pendidikan yang ditempuh, tanpa didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka ahklak yang baik tidak akan terbentuk.

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Pendukung penelitian yang akan dilakukan, perlu adanya hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan ini, peneliti melihat dari penelitian-penelitian yang terdahulu sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat-pendapat dari karya ilmiah yang relevan sesuai dengan penelitian.

1. Thamrin Nurdin, dalam penelitian yang berjudul PELAKSANAAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT KEPADA PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI DESA TERTINGGAL (SUMATERA BARAT), menyimpulkan tingkat partisipasi masyarakat di desa tertinggal ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat masyarakat Sumatera Barat. Persepsi masyarakat desa tertinggal terhadap program wajib belajar dua belas tahun sebenarnya positif. Rendahnya partisipasi dari masyarakat desa tertinggal lebih banyak dipengaruhi oleh factor ekonomi keluarga dan kemauan si anak itu sendiri, serta ketersediaan fasilitas pendidikan dasar, khususnya fasilitas SLTP. Berbagai factor yang berpotensi besar terhadap terjadinya 'drop-out' di tingkat pendidikan dasar adalah: a) kemampuan ekonomi orang tua murid dan keinginan si anak untuk membantu beban ekonomi keluarga serta b) kurangnya kepedulian orang tua murid terhadap pendidikan anak-anaknya dan pengaruh lingkungan atau pergaulan sehari hari.

2. Didi Prayitno, dkk, dalam penelitian berjudul ANALISIS RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT PADA IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN (STUDI KASUS DI DISTRIK SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE), menyimpulkan pandangan dari orang tua terhadap program wajib belajar dua belas tahun masih rendah. Hal itu terlihat dari tanggapan orang tua, rata-rata mereka lebih senang apabila anak-anak mereka bisa membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Rendahnya kondisi social ekonomi orang tua mengakibatkan rendahnya pula kemampuan serta dukungan orang tua bagi program wajib belajar dua belas tahun. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya dengan peneliti yang dilakukan oleh penulit yaitu: persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif namun juga perbedaannya saya mengambil pembangunan masyarakat bidang pendidikan melalui program wajib belajar dua belas tahun dan yang mereka itu mengenai partisipasi masyarakat pada implementasi program wajib belajar dua belas tahun, penggunaan teori dalam membahas masalah, tempat penelitian yang berbeda dari sebelumnya lebih memfokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat pada implementasi program wajib belajar dua belas tahun, karena sebagaimana keadaan Desa Nanga Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir penulis lebih tertarik memfokuskan pada bagaimana pembangunan masyarakat bidang pendidikan melalui program

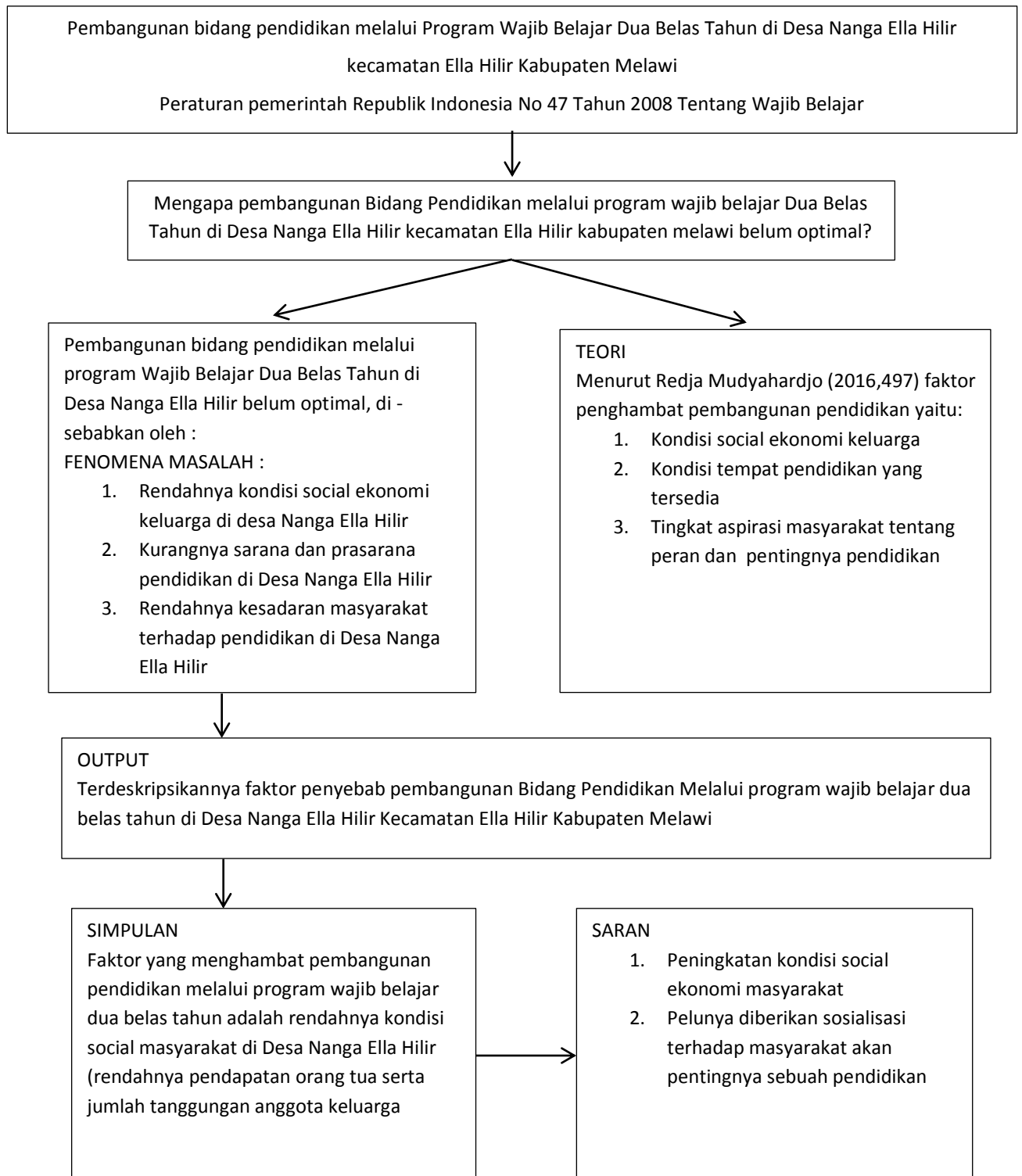
wajib belajar dua belas tahun karena sesuai dengan peristiwa yang ada di Desa Nangga Ella Hilir.

2.4. Alur Pikir Penelitian

Menurut Uma Sekaran (Sugiyono 2011,60) yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, dengan demikian kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi focus penelitian adalah belum optimalnya Pembangunan Masyarakat Bidang Pendidikan Melalui Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Desa Nanga Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi.

Peneliti mengidentifikasikan beberapa permasalahan dalam pembangunan masyarakat bidang pendidikan melalui program wajib belajar dua belas tahun antara lain: (1). Rendahnya kondisi sosial ekonomi keluarga di Desa Nanga Ella Hilir, (2) kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di Desa Nanga Ella Hilir , (3) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di Desa Nanga Ella Hilir . Hasil penelitian ini diharapkan berhasilnya pembangunan masyarakat bidang pendidikan melalui program wajib belajar dua belas tahun di desa Nanga Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, untuk memperjelas kerangka pikir dalam penelitian ini maka peneliti membuat skema pada gambar berikut:

Kerangka Berpikir



2.5 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis berusaha untuk mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah dan terfokus pada pokok masalah yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi social ekonomi masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Bidang Pendidikan Melalui Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Desa Nanga Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi?
2. Bagaimana kondisi tempat pendidikan yang tersedia dalam Pembangunan Masyarakat Bidang Pendidikan Melalui Program Wajin Belajar Dua Belas Tahun di Desa Nanga Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi?
3. Bagaimana tingkat aspirasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat Bidang Pendidikan Melalui Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Desa Nanga Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir?